

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Manajemen Mutu Pendidikan

#### 1. Pengertian Manajemen Mutu

Manajemen dari segi bahasa berasal dari bahasa latin *manus* yang mempunyai arti tangan dan *agree* yang berarti melakukan, jika digabung menjadi kata kerja “*manager*” Yang artinya menangani. Sementara dalam bahasa Inggris *managere* diterjemahkan dengan kata benda *to manage* dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang-orang yang melakukan kegiatan manajemen yang berarti mengelola, mengatur, mengurus, melaksanakan, memperlakukannya.<sup>1</sup>

Sedangkan manajemen menurut istilah adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat.<sup>2</sup> Manajemen adalah proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>3</sup>

Menurut James A.F. Stoner dalam bukunya *Management*, diungkapkan bahwa: Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang ditetapkan<sup>4</sup>

Beni Ahmad Saebani dan Koko Komaruddin menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya yang dimiliki

<sup>1</sup>Agus Wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Cet.I, 29

<sup>2</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 109

<sup>3</sup> Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), 16-17.

<sup>4</sup> Fari Ulfah, *Manajemen PAUD*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2015) cet.I, 25

untuk mencapai tujuan. Sebagai seni dan ilmu, di dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk mencapai tujuan. Selain itu juga terdapat teknik-teknik dan nilai-nilai kepemimpinan yang saling berhubungan antara satu sama lain yang digunakan untuk mewujudkan tujuan. Sehingga dengan demikian di dalam manajemen mengandung empat unsur pokok yang berupa pemimpin, orang yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai, dan kerjasama dalam mencapai tujuan<sup>5</sup>

Manajemen dalam dunia pendidikan adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dalam dunia manajemen menggunakan prinsip (planning, organizing, actuating, dan controlling). Prinsip manajemen ini banyak sekali digunakan oleh organisasi besar untuk memajukan serta mengelola organisasi maupun lembaga. Dari keempat fungsi di atas dianggap mencukupi bagi aktivitas manajerial yang akan memadukan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya material melalui kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>6</sup>

Mutu dalam bahasa Inggris “*quality* artinya kualitas”<sup>7</sup>. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia “Mutu adalah (ukuran), baik buruk suatu benda; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya)”<sup>8</sup>. Secara istilah mutu adalah “Kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan”<sup>9</sup>. Dengan demikian mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan.

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani dan Koko Komaruddin, *Filsafat Manajemen Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 18.

<sup>6</sup> Muhammad Kristiawan, dkk., *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Deeplublish, 2017), 24

<sup>7</sup> John M. Echolis, Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 1988) Cet. Ke XVI, 460.

<sup>8</sup> Lukman Ali, Kamus bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke-4, 677.

<sup>9</sup> M.N. Nasution, *Manajemen Mutu terpadu*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), Cet. ke-3, 15.

Menurut Edward Sallis mengatakan bahwa mutu adalah sebuah metodologi yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan<sup>10</sup> Menurut ahli lainnya, Sudarwan Danim, mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang dan jasa, jika dikaitkan dengan dunia pendidikan maka barang dan jasa bisa bermakna dilihat atau tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan, dengan mengacu pada masukan, proses, luaran dan dampaknya dalam pendidikan.<sup>11</sup> Dengan demikian, mutu dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Artinya, bisa dikatakan bermutu bukan karena mahal atau eksklusif tetapi memiliki nilai keunggulan dan kepuasan tersendiri dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh pendidikan tersebut

Dalam konteks pendidikan, menurut Kementerian Pendidikan Nasional yang dikutip oleh Mulyasa, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan merupakan sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan demi berlangsungnya suatu proses. Sementara proses pendidikan merupakan perubahan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Selanjutnya, output pendidikan merupakan kinerja sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses dan perilaku sekolah. Oleh sebab itu, mutu dalam dunia pendidikan dapat dinyatakan lebih mengutamakan pada keberhasilan siswa. Dengan kata lain, program perbaikan sekolah dilakukan lebih secara kreatif dan konstruktif.<sup>12</sup>

Dalam pandangan Islam penjelasan tentang manajemen telah ada di dalam al-Qur'an surat as-Sajdah ayat 5.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (٥).

---

<sup>10</sup> Edward Sallis, *Total Quality Management In Education*, terj. Ali Riyadi (Yogyakarta: 2006), 33.

<sup>11</sup> Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 33.

Artinya : *“Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”*<sup>13</sup>

Surat as-Sajdah ayat 5 tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya Allah mengelola semua urusan yang terdapat di langit dan di bumi menggunakan manajemen atau pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga apa yang terjadi di *belakang* yakni kesudahan, dampak atau akibatnya telah diperhitungkan dengan matang, sehingga hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>14</sup>

Kesimpulannya manajemen ialah cara tepat yang dipilih untuk membuat tujuan suatu kegiatan dapat dicapai dengan baik. Manajemen berisikan strategi, teknik, rencana, pembagian kerja, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara teratur dalam menggunakan sumber daya. Di samping itu manajemen didukung dengan kelengkapan empat komponen yaitu pemimpin, orang yang dipimpin, tujuan, dan kerja sama.

manajemen mutu dalam pendidikan sering disebut sebagai Total Quality Manajement (TQM). Aplikasi konsep manajemen mutu- TQM dalam pendidikan ditegaskan oleh Sallis yaitu Total Quality Management adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelangganya, saat ini dan untuk masa yang akan datang. Definisi tersebut menjelaskan bahwa manajemen mutu-TQM menekankan pada dua konsep utama. Pertama, sebagai suatu filosofi dari perbaikan terus menerus (continuous improvement) dan kedua, berhubungan dengan alat- alat dan teknik seperti “*brainstorming*” dan “*force field analysis*” (analisis kekuatan lapangan), yang digunakan untuk

---

<sup>13</sup> Al-Qur’an, as-Sajdahayat 5, *Al-Qur’an Ayat Pojok Terjemah Menara* (Kudus: Menara Kudus), 416.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jilid 11)* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 180.

perbaikan kualitas dalam tindakan manajemen untuk mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa arti kata dan pendapat dapat disimpulkan manajemen mutu pendidikan adalah menggerakkan lembaga pendidikan untuk secara terus menerus dan berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaganya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan peserta didik dan masyarakat dan mampu bersaing ditengah-tengah kemajuan globalisasi.

## 2. Fungsi-fungsi manajemen Mutu

Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen adalah Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah *Planning, Organizing, Motivating dan Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain tentang fungsi-fungsi manajemen. Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik.<sup>16</sup> Persamaan tersebut tampak pada beberapa fungsi manajemen sebagai berikut:

### a. Perencanaan (*Palnning*)

Perencanaan adalah penentuan secara matang dan cerdas tentang apa yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Aderson sebagaimana yang dikutip oleh Marno, mengatakan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan seperangkat keputusan bagi perbuatan dimasa datang.<sup>17</sup> Definisi ini mengisyaratkan bahwa pembuatan keputusan merupakan bagian dari perencanaan, namun proses perencanaan dapat

---

<sup>15</sup> Edward Sallis, *Total Quality Manajement In Education*, terj. Ali Riyadi (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 23.

<sup>16</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 3-4.

<sup>17</sup> Marno & Trio Supriyanto, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: P.T Refika Aditama, 2008), 13.

juga terpikir setelah tujuan dan keputusan diambil. Perencanaan selalu terkait dengan masa depan, dan masa depan selalu tidak pasti, banyak faktor yang berubah dengan cepat. Tanpa perencanaan, sekolah atau lembaga pendidikan akan kehilangan kesempatan dan tidak dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang akan dicapai, dan bagaimana mencapainya. Oleh karena itu rencana harus dibuat agar semua tindakan terarah dan terfokus pada tujuan yang hendak dicapai.<sup>18</sup>

Mondy & Premeaux seperti yang dikutip Syafaruddin menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Berarti dalam perencanaan akan ditentukan apa yang akan dicapai dengan membuat rencana dan cara-cara melakukan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di setiap level manajemen.<sup>19,24</sup>

Jadi, perencanaan adalah tahap pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan di masa depan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut G. Terry sebagaimana ditulis oleh Ulbert Silalahi adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan diantara mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu mendapat perhatian dari kepala sekolah. Fungsi ini perlu dilakukan untuk mewujudkan struktur organisasi sekolah, uraian tugas tiap bidang, wewenang dan tanggungjawab menjadi lebih jelas, dan penentuan sumber daya manusia dan materil yang diperlukan.<sup>20</sup> Menurut

---

<sup>18</sup>Marno & Trio Supriyanto, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: P.T Refika Aditama, 2008), 13.

<sup>19</sup> Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 61.

<sup>20</sup> Ulbert Silalahi, *Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori, dan Dimensi*, (Bandung: Sinar Baru, 2002), 135.

Robbins, bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian dapat mencakup (1) menetapkan tugas yang harus dilakukan; (2) siapa yang mengerjakannya; (3) bagaimana tugas itu dikelompokkan; (4) siapa yang melapor; (5) di mana keputusan itu harus diambil.<sup>21</sup>

Pengorganisasian berarti ; (1) menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu organisasi pada tujuan, (3) menugaskan seseorang atau kelompok orang dalam suatu tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu, (4) mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keleluasaan melaksanakan tugas. Dengan rincian tersebut, manajer membuat suatu struktur formal yang dapat dengan mudah dipahami orang dan menggambarkan suatu posisi dan fungsi seseorang di dalam pekerjaannya.<sup>22</sup>

c. Penggerakan (*Actuating*)

Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. *Actuating* merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan merupakan ruang lingkup yang cukup luas serta sangat berhubungan dengan sumber daya manusia.<sup>23</sup> *Actuating* secara umum juga diartikan sebagai menggerakkan orang lain. Penggerakan pada hakikatnya merupakan suatu usaha dan dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *avtuating* merupakan suatu kegiatan untuk menggerakkan orang-

---

<sup>21</sup> Robbin, S.P. *Perilaku Organisasi*, Jilid I Terj. Tim Indek (Jakarta: PT Indek Gramedia, 2003), h. 5.

<sup>22</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan UI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 94.

<sup>23</sup> Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam, Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 31.

<sup>24</sup> Sulistyorini dan Muhammad Fathurrohman, *Esensi Manajemen Pendidikan Islam Pengelolaan Lembaga untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 48.

orang dalam suatu organisasi agar dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi ke-empat dari seorang pemimpin adalah pengawasan (*controlling*). Secara etimologis, “*controlling*” lazimnya diterjemahkan dengan “pengendalian”. G. Terry merumuskan pengawasan (*controlling*) sebagai suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengawasan berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai.<sup>25</sup>

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengawasan dapat melibatkan beberapa elemen-elemen yaitu: (1) menetapkan standar kinerja, (2) mengukur kinerja, (3) membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan, (4) mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan.<sup>26</sup> Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Seorang manajer dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik, jika mengetahui secara jelas proses pengawasan tersebut secara jelas.

### 3. Unsur-Unsur Manajemen Mutu Pendidikan

Peningkatan kualitas lembaga pendidikan bermutu harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan ditentukan oleh banyak pihak yang berkecimpung di dalamnya, antara lain pemerintah, masyarakat, pihak sekolah, orang tua dan siswa itu sendiri. Dengan kerjasama dari semua pihak tersebut peningkatan mutu yang terintegrasi dan terprogram pun akan mudah didapat.

---

<sup>25</sup> Marno & Trio Supriyanto, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: P.T Refika Aditama, 2008), 24.

<sup>26</sup> Marno & Trio Supriyanto, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: P.T Refika Aditama, 2008), 24.

Adapun unsur mutu dalam konteks pendidikan mencakup 3 komponen penting, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Input. Input pendidikan merupakan suatu yang harus tersedia karena dibutuhkan demi kelangsungan suatu proses pendidikan. Bisa dicontohkan segala bentuk bahan ajar, sarana dan prasarana sekolah, administrasi, suasana yang kondusif, serta sumber daya lainnya yang menunjang keberhasilan suatu proses pendidikan. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Dengan kata lain, input merupakan prasyarat bagi berlangsungnya proses. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi mutu input tersebut.<sup>28</sup>
- b. Proses. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, tanpa adanya proses yang baik, predikat sekolah yang bermutu tidak akan dicapai. Dalam proses pendidikan ini bisa disebutkan sebuah tindakan pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar serta proses monitoring dan evaluasi. Dengan catatan, bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dalam proses-proses yang lain. Proses dikatakan bermutu jika pengoordinasian dan penyesuaian serta pemanduan input sekolah dilakukan secara harmonis, sehingga dapat mencipayakan pembelajaran yang nyaman, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.
- c. Output. Output pendidikan merupakan hasil kinerja sekolah, bisa disebutkan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses dan perilaku sekolah itu sendiri. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya,

---

<sup>27</sup> Alfiatu Solikah, *Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran pada Sekolah Unggulan: Studi Multisitus di MI Darul Muta'alimin Patianrowo Nganjuk, MI Muhammadiyah 1 Pare dan SDN Katolik Frateran 1 Kota Kediri*, (Yogyakarta: Deepublish), 2.

<sup>28</sup> Imam Machalli dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 365.

efisiennya, inovasinya, kualitas kerjanya dan moral kerjanya<sup>29</sup>

Berdasarkan deskripsi diatas maka input pendidikan yang merupakan faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan dapat berupa: 1) Sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah yang terdiri dari; Kepala sekolah, Guru sebagai pendidik professional, tenaga administrasi, 2) Sarana dan prasarana, 3) kesiswaan 4), keuangan (Anggaran Pembiayaan), 5) kurikulum, 6) keorganisasian, 7) lingkungan fisik, 8) perkembangan ilmu pengetahuan, 9) peraturan 10) partisipasi atau peran serta masyarakat, 11) kebijakan pendidikan.<sup>30</sup>

Mutu pendidikan dapat dicapai dengan melakukan manajemen berbagai komponen dasar pendidikan. Kepedulian akan mutu pendidikan didorong oleh persoalan dasar, bagaimana mengintegrasikan semua fungsi dan proses dalam suatu organisasi agar tercapai peningkatan mutu secara berkelanjutan. Menurut Mujamil komponen-komponen dasar pendidikan yang mutlak harus ada dalam proses peningkatan mutu pendidikan yaitu (1) Pendidik dan Tenaga kependidikan, (2) kesiswaan, (3) kurikulum pendidikan, (4) sarana Prasarana (5) Pembiayaan<sup>31</sup>. Dengan melalui penerapan manajemen lima komponen dasar pendidikan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan sekolah menjadi sekolah yang bermutu tinggi. Adapun lima komponen dasar dalam pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Pendidik dan Tenaga kependidikan

Sumber daya manusia yang pertama sebagai pengelola lembaga pendidikan yaitu kepala sekolah yang secara tupoksinya adalah sebagai manajer pada lembaga pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Mewujudkan mutu pendidikan tidak terlepas dari manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai seorang manajer di lembaga tersebut. Untuk itu Peran dan tanggung jawab kepala sekolah sangatlah berpengaruh dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di lembaga yang dipimpinnya.

---

<sup>29</sup> Aminatul Zahroh, Total Quality Management (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 28.

<sup>30</sup> Edwards, Sallis. "Manajemen Mutu Pendidikan". *terj.* Ali Riyadi (Yogyakarta, 2006), 31-33

<sup>31</sup>

Kompetensi manajerial bagi kepala sekolah merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai visi dan misi sekolah, mewujudkan sekolah yang unggul, berprestasi, dan berbudaya mutu. Kunci keberhasilan kepala sekolah sebagai manajer adalah ketika setiap lini bergerak bersamasama secara efektif dan efisien.<sup>32</sup>

Kepala sekolah adalah seorang manajer, sebagai seorang manajer kepala sekolah harus memiliki kompetensi manajerial. Diibaratkan dalam sebuah rumah tangga, maka kepala sekolah adalah sebagai kepala rumah tangga yang otomatis memiliki tanggung jawab besar dalam menata rumah tangganya agar menjadi nyaman dan aman sesuai dengan konsep-konsep “rumahku surgaku atau rumahku istanaku” Dengan demikian kompetensi manajerial bagi kepala sekolah merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencapai visi dan misi sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, dalam mewujudkan sekolah yang unggul, berprestasi, berbudaya, dan bermutu.

Adapun kunci keberhasilan kepala sekolah sebagai manajer adalah ketika setiap individu bergerak bersama-sama secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan suatu keberhasilan tersebut tentunya kepala sekolah tidak melaksanakannya sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari guru dan tenaga kependidikan lainnya, dalam hal ini staff. Ada banyak hal yang harus dikelola oleh seorang kepala sekolah antara lain Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga administrasi sekolah, kesiswaan, keuangan, sarana prasarana, dan sebagainya. Sebagai seorang manajer sekolah, tentunya kepala sekolah harus memunculkan karakter manajemen yang professional, dalam arti segala sesuatunya tidak dilakukan atau diurus sendiri secara detail, namun dapat didelegasikan kepada yang lainnya (guru/staf).

Guru adalah sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam melaksanakan pendidikan pada peserta didik, dalam hal ini peserta didik taman kanak-kanak atau anak usia dini. Seorang guru dalam melaksanakan tugasnya memberikan pendidikan, pembimbingan dan pengasuhan harus memiliki Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan bagi seorang pendidik anak usia

---

<sup>32</sup> Idris Apandi. “Kepala Sekolah Kreatif dan Inovatif di Era Revolusi Industri” 4.0 (Alvian C (ed.); I). Yogyakarta, Samudra Biru.2019, Hlm; 59

dini menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2014 pasal 25 adalah (1) Kualifikasi Akademik Guru PAUD: (a) memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau (b) memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. (2) Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Berikut akan diuraikan satu persatu<sup>33</sup>

(1) Kompetensi Pedagogik meliputi;

(a) Mengorganisasikan aspek perkembangan sesuai dengan karakteristik anak usia dini, (b) Menganalisis teori bermain sesuai aspek dan tahapan perkembangan, kebutuhan, potensi, bakat, dan minat anak usia dini. (c) Merancang kegiatan pengembangan anak usia dini berdasarkan kurikulum. (d) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. (e) Memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. (f) Mengembangkan potensi anak usia dini untuk pengaktualisasian diri. (g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. (h) Menyelenggarakan dan membuat laporan penilaian, evaluasi proses dan hasil belajar anak usia dini. (i) Menentukan lingkup sasaran asesmen proses dan hasil pembelajaran pada anak usia dini. (j) Menggunakan hasil penilaian, pengembangan dan evaluasi program untuk kepentingan pengembangan anak usia dini. (k) Melakukan tindakan reflektif, korektif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pengembangan anak usia dini.

(2) Kompetensi Kepribadian meliputi:

(a) Bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. (b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi anak usia dini dan masyarakat. (c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, bijaksana, dan berwibawa.

---

<sup>33</sup> Kemdikbud RI. "Lampiran 2 Permendikbud Nomor 137 tahun 2014" Jakarta, 2014. 203

- (d)Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa percaya diri, dan bangga menjadi guru, (e)Menjunjung tinggi kode etik guru.
- (3) Kompetensi Profesional meliputi :
- (a)Mengembangkan materi, struktur, dan konsep bidang keilmuan yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak usia dini. (b)Merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. (c)Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- (4) Kompetensi Sosial meliputi :
- (a)Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, suku, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.(b)Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.(c)Beradaptasi dalam keanekaragaman sosial budaya bangsa Indonesia. (d)Membangun komunikasi profesi.

Dengan demikian selain harus memiliki keempat kompetensi sebagai seorang pendidik profesional, juga harus memiliki kulaifikasi akademik yang linier sesuai dengan tupoksinya yaitu guru PAUD atau taman kanak-kanak, sehingga diharapkan dengan memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang ada seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesionalnya dapat berkontribusi secara maksimal untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidik yang profesional adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi pencapaian mutu pendidikan.

#### b. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>34</sup> Mengacu pada pengertian tersebut maka kurikulum dikatakan

---

<sup>34</sup> UU RI, NO.20, 2003. “Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2003, 6.

sebagai seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang akan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang diberikan pada peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum adalah salah satu komponen terpenting dan terstruktur dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum dipandang sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan proses pendidikan.

Kurikulum harus dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam kelanjutan pendidikan dan kehidupannya. Kurikulum harus memiliki jangkauan yang lebih luas dan jauh. Kurikulum harus menyiapkan anak untuk masa depan bukan hanya untuk masa kini. Kurikulum harus responsive terhadap kebutuhan dunia yang selalu berubah. Kurikulum yang responsif berarti kurikulum yang menyadari kondisi saat ini dan memahami kondisi yang diharapkan di masa depan. Ada tiga kondisi yang memberikan alasan mengapa kurikulum berubah, yaitu: (1) perubahan kondisi dan kebutuhan dunia yang semakin kompleks menuntut sumber daya manusia yang responsif terhadap segala perubahan dan kritis terhadap permasalahan yang dihadapi; (2) globalisasi di bidang ekonomi berakibat batasan antar negara semakin longgar, dalam pemenuhan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kurikulum harus mampu membangun keluaran pendidikan menjadi sumber daya pembangunan yang memiliki kemampuan yang kompetitif, sikap kreatif, dan adversity yang tinggi; (3) pesatnya perkembangan sains dan teknologi sehingga dunia tanpa batas, dan semua mengetahui semua dan yang kuat mempengaruhi yang kurang kuat. Untuk itu kurikulum pendidikan harus mampu membangun sikap dan karakter kuat dari peserta didik agar tetap menjaga jati diri, kehormatan keluarga, dan kebanggaan bangsa tanpa harus merasa tertinggal dari negara lain<sup>35</sup>

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta

---

<sup>35</sup> Suminah, E. dkk. "Kurikulum Pendidikan PAUD: Apa, Mengapa dan Bagaimana. 021". Jakarta, Dirjen PAUD Kemdikbud, 2015, Hlm;4

didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD. KTSP diperlukan sebagai acuan atau panduan lembaga untuk: (1) menyelenggarakan program Lembaga. (2) melaksanakan berbagai layanan dilembaga. (3) melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi hasil belajar.<sup>36</sup>

Dengan demikian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dikembangkan serta dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dengan karakteristik yang dimilikinya masing-masing lembaga. Artinya karena karakteristiknya bersifat masing-masing sekolah, tentu antara sekolah yang satu dengan yang lain pasti berbeda, pengelolaan program pembelajarannya serta fasilitas dan sarana prasarana bahkan biayanya juga. Hal ini karena bergantung pada tingkat santunan pendidikannya, dan kewenangan serta kebijakan ada pada satuan pendidikan masing-masing.

KTSP juga disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak, cara belajar anak dengan layanan yang menyeluruh dan terpadu dari layanan kesehatan dan gizi terutama ditujukan untuk membantu pertumbuhan anak, serta layanan perlindungan dan pengasuhan anak dan pembimbingan melalui belajar seraya bermain, memberi pengalaman belajar yang bermakna dan melestarikan karakteristik budaya yang dimilikinya.

Tahapan manajemen kurikulum meliputi (1) Tahap perencanaan, (2) Tahap pengorganisasian dan koordinasi, (3) tahap pelaksanaan, dan (4) tahap pengendalian/penilaian<sup>37</sup>

c. Peserta Didik/Kesiswaan

Eka Prihatin memaparkan bahwa manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Karena itu manajemen kesiswaan di harapkan bisa menjadi pondasi terciptanya peserta didik yang handal. Menurut

---

<sup>36</sup> Depdiknas, B. S. N. "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan". Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 021, 9-27.2006, Hlm: 1

<sup>37</sup> Tim, Panduan Manajemen Sekolah, (Jakarta : Direktur Pendidikan Menengah Depdikbud, 1998), h. 5

Mulyasa, Manajemen kesiswaan atau manajemen kemuridan (peserta didik) merupakan salah satu bidang operasional MBS.<sup>38</sup>

Manajemen kesiswaan adalah penataan atau pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk hingga sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan disekolah.<sup>39</sup> Melalui proses ini peserta didik di bina dari pertama masuk hingga nanti keluar.

Ruang Lingkup Manajemen kesiswaan adalah suatu pengaturan terhadap peserta didik dari mulai masuk sampai dengan keluar/lulus sekolah, baik yang berkenaan langsung dengan peserta didik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya pada tenaga kependidikan, sumber-sumber pendidikan, sarana dan prasarana dsb).

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki tugas utama yang harus diperhatikan yaitu, penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Siswa adalah subyek pendidikan, bukan obyek yang bisa dieksploitasi. Sebagai subyek inilah, inspirasi, gagasan, isu, dan pemikirannya harus didengar. Bakat, minat, dan keahlian yang dimiliki anak didik juga harus digali dan dikembangkan.<sup>40</sup>

#### d. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang harus terpenuhi dalam menunjang sistem pendidikan. Sarana prasarana sangat penting bagi pembelajaran, yang meliputi ketersediaan dan pemanfaatan

---

<sup>38</sup> Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4.

<sup>39</sup> Mulyasa, Manajemen Berbasis (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 45-46.

<sup>40</sup> Jamal Ma'ruf Asmani, Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan, Diva Press, Jogjakarta, 2012, hlm. 91

sumber belajar bagi guru, siswa serta penataan ruangan-ruangan yang dimiliki. Keberadaan sarana pendidikan mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan, sehingga termasuk dalam komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses pendidikan. Tanpa sarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan.<sup>41</sup>

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.<sup>42</sup>

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dinamakan dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Standar sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, pada BAB VIII pasal 31 sebagai berikut : (1) sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. (2) pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan. (3) prinsip pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: (a) aman, bersih, sehat, nyaman,

---

<sup>41</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 141-142

<sup>42</sup> Jamal Ma'ruf Asmani, *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan*, (Jogjakarta: Diva Press 2012), 90

dan indah; (b)sesuai dengan tingkat perkembangan anak;(c)memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan. Prinsip pengadaan sarana prasarana meliputi:aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah sesuai dengan tingkat perkembangan anak memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.<sup>43</sup>

Pengaturan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak acuan minimalnya harus sesuai dengan permendikbud ini, adapun apabila lembaga pendidikan memiliki sarana dan prasarana yang lebih dari standar yang ditetapkan hal ini akan lebih baik lagi, sehingga pembelajaran akan lebih berkualitas karena didukung sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk proses tumbuh kembang anak usia dini.

e. Pembiayaan

Standar pembiayaan pendidikan anak usia dini diatur dalam permendikbud nomor 137 tahun 2014 pada BB X Pasal 37 adalah (1) Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. (2)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan saranaprasarana, serta pengembangan SDM. (3)Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. (4)Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat.(5)Pengawasan dan pertanggungjawaban

---

<sup>43</sup> Permendikbud 137 tahun 2014, tentang standar Sarana dan prasarana PAUD, (14 Januari 2021)

keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Uraian diatas adalah acuan minimal tentang pembiayaan suatu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Akan tetapi pengelolaan pembiayaan pendidikan di Taman Kanak-kanak bagaimana kebijakan lembaga tersebut, sebab pendidikan yang berada dibawah penyelenggaraan Yayasan maka kebijakan mutlak dalam hal pembiayaan menurut aturan yang ditetapkan oleh Yayasan masing-masing, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah hanyalah sebagai acuan minimal pembiayaan dalam pengelolaan pendidikan. Akan tetapi pemerintah tetap membantu pembiayaan operasional melalui dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau disingkat BOP-PAUD.

#### 4. Prinsip- Prinsip Manajemen Mutu

Prinsip mutu adalah sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini memiliki kekuatan untuk mewujudkan mutu. Akan hal ini berbagai ahli dan organisasi mencoba merumuskan prinsip-prinsip untuk dapat mewujudkan mutu dalam organisasi.

##### a. Fokus pelanggan (*Customer Focus*)

Sekolah harus memahami dan memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan (siswa, orang tua, dan masyarakat serta pemerintah). Dari pemerintah dapat berupa kebijakan pendidikan, khususnya kurikulum nasional. Untuk mengetahui harapan siswa, orang tua dan masyarakat sekolah dapat melakukan pertemuan, misal dengan cara diskusi grup terfokus (*focus group discussion*), survey, dan wawancara.

##### b. Keterlibatan secara penuh (*total involment*)

keterlibatan total yaitu orangtua, siswa, dan pendidik, untuk bersama-sama terlibat, bertanggung jawab dan berfokus pada peningkatan mutu.

##### c. Pengukuran.

Pengukuran, yaitu mengukur capaian mutu yang diprogramkan dilanjutkan dengan analisis dan evaluasi

---

<sup>44</sup> Kementerian Pendidikan Nasional RI. “Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini No 137 Tahun 2014”. Jakarta, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014, 1–76.  
<https://portaldik.id/assets/upload/peraturan>

capaian mutu. Bila mutu yang dirancang sekolah telah tercapai maka perlu dirancang peningkatan mutu program pada siklus berikutnya, namun bila mutu yang dirancang belum dicapai maka sekolah perlu merevisi rancangan programnya. Siklus pengukuran dan evaluasi ini perlu dilakukan sesuai siklus tahunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

d. Komitmen

Komitmen yaitu komitmen pimpinan puncak dan menengah (kepala sekolah dan para wakilnya, ketua divisi) untuk memfasilitasi kebutuhan guru, staf, siswa dan warga sekolah lainnya untuk memenej perubahan dan meningkatkan mutu sekolah. Komitmen disini mencakup komitmen atas dukungan kebijakan, dana, waktu manejer untuk terlibat langsung dalam kegiatan.

e. Perbaikan berkelanjutan

perbaikan menerus dan berkesiambungan, Semangat dan kemampuan untuk melakukan perbaikan ini menuntut komitmen semua pihak khususnya manajer untuk melakukan pelatihan atau pengembangan kapasitas warga sekolah untuk dapat melakukan perbaikan capaian mutu selaras dengan program yang dirumuskan dalam RPS.

Kelima pilar tersebut digambarkan sebagaimana sebuah bangunan dengan pondasi visi dan misi, keyakinan dan nilai-nilai. Pondasi dalam bangunan TQM ini sangat penting karena kelima pilar dan bangunan TQM tidak dapat berdiri tegak manakala pondasinya tidak kuat. Untuk itu pihak sekolah terutama kepala sekolah dan komite serta pemangku kepentingan lainnya perlu sekali merumuskan visi dan misi sekolah, keyakinan dan nilai-nilai (falsafah) yang melibatkan atau mengakomodasi aspirasi semua pihak di atas untuk menampung semua kepentingan dan yang terpenting menumbuhkan rasa memiliki dari mereka terhadap sekolah dan program-program peningkatan mutunya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sutarto HP, *Manajemen Mutu Terpadu (MMT-TQM) Teori dan Penerapan di Lemabaga Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2015) Cet. 1, 32-35

Menurut Deming ada 14 prinsip mutu yang dilakukan organisasi atau lembaga jika menghendaki dicapainya mutu :

1. Menciptakan konsistensi tujuan untuk pengembangan produk dan jasa dengan adanya tujuan suasana pendidikan yang kompetitif.
2. Adopsi filosofi baru.
3. Menghentikan ketergantungan pada adanya inspeksi dan digantikan dengan upaya pencapaian mutu.
4. Menghentikan anggapan bahwa penghargaan dalam dunia pendidikan adalah terletak pembiasaan.
5. Peningkatan sistem produksi dan layanan secara terus menerus guna peningkatan mutu dan produktifitas
6. Pelatihan dalam pekerjaan.
7. Kepemimpinan lembaga.
8. Menghilangkan rasa takut.
9. Hilangkan penghalang antar departemen atau biro.
10. Mengurangi slogan peringatan-peringatan dan target dan menggani dengan pemantapan dan metode-metode yang dapat meningkatkan mutu kerja.
11. Kurangi standar kerja yang menentukan kuota berdasarkan jumlah.
12. Hilangkan penghambat yang dapat merampas hak asasi manusia untuk merasa bangga terhadap kecakapan kerjanya.
13. Lembagakan suatu program pendidikan dan peningkatan diri yang penuh semangat.
14. Setiap orang dalam lembaga bekerja sama dalam mendukung proses transformasi.<sup>46</sup>

## 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Mutu Pendidikan

Pelaksanaan mutu pendidikan dapat tercapai dengan baik apabila ada faktor yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling berhubungan. Adapun yang mempengaruhi adalah :<sup>47</sup>

### a. Faktor Tujuan

---

<sup>46</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan Univ. Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan* (Bandung, Alfa Beta, 2013), 296-297.

<sup>47</sup> Zahara Idris dan Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 28

Tujuan dalam pendidikan merupakan sesuatu yang hendak dicapai dari pembelajaran yang dilakukan. Tujuan dalam pendidikan ini berfungsi sebagai arah pendidikan, tujuan sebagai titik akhir, tujuan sebagai titik pangkal untuk mencapai tujuan lain dan memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Untuk itu, dalam meningkatkan mutu pendidikan maka faktor tujuan ini perlu diperhatikan. Sebab mutu suatu lembaga pendidikan yang berpegang pada tujuan sehingga mampu menghasilkan output yang berkualitas, sesuai dengan arah/sasaran yang harus dicapai oleh institusi/lembaga pendidikan.

b. Faktor Guru (pendidik)

Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus benar-benar membawa peserta didiknya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru harus mampu mempengaruhi siswanya. Guru harus berpandangan luas dan tentunya juga mempunyai empat kompetensi dasar yang harus dikuasai yaitu kompetensi pedagogik, sosial, pribadi, dan kompetensi profesional. Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena gurulah yang merupakan penggerak utama dalam melaksanakan kegiatan.

Oleh karena perannya yang begitu penting dalam peningkatan mutu pendidikan, maka kualitas guru harus terus ditingkatkan dengan cara:

- 1) Meningkatkan pengetahuan guru melalui penataran, kursus, tugas untuk belajar, dsb.
- 2) Mengadakan musyawarah antar guru dan semua warga madrasah dalam memecahkan suatu masalah/meningkatkan mutu pendidikan
- 3) Mengaktifkan guru melalui pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan
- 4) Mengadakan studi perbandingan dengan madrasah yang sudah maju dengan harapan dapat memberi masukan yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.

c. Faktor Peserta Didik

Peserta didik atau siswa merupakan objek dari pendidikan, sehingga mutu pendidikan yang akan dicapai tidak akan lepas dengan ketergantungan terhadap kondisi fisik tingkah laku dan minat bakat dari anak didik.

d. Faktor Alat

Faktor alat atau alat pendidikan dengan segala usaha atau tindakan dengan sengaja digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu alat pendidikan keberadaannya sangat penting dalam suatu pembelajaran seperti sarana dan prasarana serta kurikulum.

e. Faktor Lingkungan atau masyarakat

Kemajuan pendidikan sedikit banyak dipengaruhi oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, karena tanpa adanya bantuan dan kesadaran dari masyarakat tentunya akan sulit untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Sekolah dan masyarakat merupakan dua kelompok yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lainnya. karena itu dibentuklah komite madrasah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan yang bertugas memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah, dan masyarakat. Disamping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orangtua, murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dan melakukan evaluasi.<sup>48</sup>

## 6. Strategi Peningkatan Mutu

Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai goal dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya<sup>49</sup>.

Tugas yang harus diemban kepala sekolah dalam memimpin atau mengelola sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang telah menerapkan suatu strategi dan bekerja secara sistematis berdasarkan strategi yang telah direncanakan untuk membina rasa kepatuhan, komitmen, pemahaman dan kepemilikan terhadap

---

<sup>48</sup> Moh Saifulloh, "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 5, no. 2 (2012): 208.

<sup>49</sup> Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. (Jakarta: Bumi Aksara: 2003)h. 12

sekolahnya yang dapat menghasilkan peserta didik yang sukses, dari pada sekolah-sekolah yang tidak mempunyai identitas budaya.<sup>50</sup>

Strategi bukan merupakan masalah penentuan tahunan, strategi membutuhkan waktu dan keamanan untuk berjalan lancar. Keberhasilan akan terjadi karena strategi dijalankan dengan konsistensi dari waktu ke waktu. Sedangkan kegagalan bisa terjadi karena strategi diubah-ubah.<sup>51</sup>

Beberapa strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan meliputi :

a) Penyusunan Rencana Program Sekolah

Rencana Kerja Sekolah (RKS) merupakan sebuah proses perencanaan atas semua hal dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan tujuan agar sekolah dapat menyesuaikan dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, sosial budaya masyarakat, potensi sekolah dan kebutuhan peserta didik. RKS (Rencana Kerja Sekolah) disusun sebagai pedoman kerja dalam pengembangan sekolah, dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah, dan sebagai bahan acuan untuk mengidentifikasi serta mengajukan sumber daya yang diperlukan.<sup>52</sup>

Rencana pengembangan sekolah ini dimaksudkan agar dapat dipergunakan sebagai kerangka acuan oleh kepala sekolah dalam mengambil kebijakan, disamping itu sebagai pedoman dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program belajar mengajar dan administrasi sekolah yang lain, agar pengelola sekolah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip manajemen. Keberhasilan perencanaan ini menuntut peran serta aktif dari seluruh warga sekolah dan dukungan dari warga masyarakat. Seluruh komponen sekolah harus mempunyai persepsi yang sama terhadap visi dan misi sehingga seluruh program yang dijalankan oleh sekolah tidak menyimpang dari visi dan misi tersebut.

---

<sup>50</sup> Soetopo, *Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan*. (Yogyakarta : Wodpress, 2009). 29

<sup>51</sup> P. Mary and Coutler, *Manajemen..* (Yogyakarta : Bumi Pelajar 2009). 231

<sup>52</sup> Ajrianto, *Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Volume 10. No.3 (2016), 240-248

struktur program kerja yang dibuat atau direncanakan nantinya akan dilaksanakan demi mencapai target yang telah ditentukan oleh seorang pendidik. Perencanaan merupakan suatu proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu.<sup>53</sup>

Tujuan di susunnya Rencana Kerja Sekolah (RKS) adalah:1) menjamin agar tujuan sekolah yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil; 2) memberikan arah kerja yang jelas tentang pengembangan sekolah; 3) acuan dalam mengidentifikasi dan mengajukan sumberdaya pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan sekolah; 4) menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 5) mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat; dan 6) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkesinambungan.

b) Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Kompetensi tidak dapat diperoleh secara tiba-tiba tetapi melalui upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa pra jabatan, yang didukung oleh bakat, minat dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan. Kompetensi pedagogik dan profesional guru ditingkatkan melalui upaya antara lain: (1) memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ilmiah yang dapat dijadikan media peningkatan kemampuan guru dalam

---

<sup>53</sup> Tarigan, rusmiati br, *upaya meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013*. Jurnal Dinamika PENELITIAN tahun 2020 nomor 20 Volume 01, 185–198.

mengelola pembelajaran atau penguasaan materi pelajaran antara lain Lesson Study, Diklat, workshop, seminar, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya; (2) meningkatkan kualitas pembinaan yang dilakukan oleh pengawas madrasah / sekolah.<sup>54</sup>

c) Pelaksanaan Supervisi Secara Rutin

Strategi yang diterapkan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan pelaksanaan supervisi secara rutin. Strategi ini ditempuh kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan sehubungan dengan kurangnya sikap profesionalisme yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakantugasnya. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala sekolah agar kepala sekolah mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi guru selama melaksanakan pembelajaran, sehingga kepala sekolah dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya.<sup>55</sup>

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh guru dan staf. Salah satu bagian pokok kepala sekolah dalam supervisi tersebut adalah mensupervisi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang biasanya disebut dengankunjungan kelas. Kunjungan atau supervisi kelas dapat dilakukan dengan tiga pola, supervisi kelas tanpa memberi tahu guru yang akan dikunjungi, kunjungan dan observasi kelas dengan terlebih dahulu memberi tahu, serta kunjungan atas undangan guru. ketiga pola tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, pola mana yang akan dipilih harus disesuaikan dengan tujuan utama kunjungan atau supervisi kelas.<sup>56</sup>

Maka dari itu, tujuan utama supervisi adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang baik.

d) Melibatkan Orang Tua dan Masyarakat

Masyarakat merupakan relasi yang cukup besar dalam memberikan pengaruh dan bantuan terhadap kelancaran

---

<sup>54</sup> Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta : Kencana, 2009). 81

<sup>55</sup> Soetopo, Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan. (Yogyakarta : Wodpress, 2009) h. 93

<sup>56</sup> Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah. (Jakarta : Kencana, 2009)h. 82

penyelenggaraan pembelajaran. Apalagi jika dikaitkan dengan keadaan sekarang bahwa masyarakat memiliki peran sebagai pengawas dan penyumbang kebutuhan sekolah dengan dibentuknya Dewan Sekolah.<sup>57</sup>

Sekolah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lingkungannya, sebaliknya masyarakat pun tidak dapat dipisahkan dari sekolah. Dikatakan demikian, karena keduanya memiliki kepentingan, sekolah merupakan lembaga formal yang disertai mandat untuk mendidik, melatih, dan membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan, sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu.<sup>58</sup>

Sekolah mengkehendaki agar peserta didik kelak menjadi manusia pembengunan yang berkualitas. Demikian pula masyarakat, mengharapkan agar sekolah dapat menempa sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas sehingga dapat mengembangkan berbagai potensi masyarakat setelah kembali hidup bermasyarakat.

Berdasarkan dimensi kepentingan sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, memperlancar kegiatan belajar-mengajar, dan memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah.<sup>59</sup>

## **B. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

### **1. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permendikbud 146 tahun 2014 pasal 1 tentang kurikulum 2013 :

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar sebagai suatu

---

<sup>57</sup> Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta : Kencana, 2009).h. 81

<sup>58</sup> Soetopo, Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan. (Yogyakarta : Wodpress, 2009). 93

<sup>59</sup> Soetopo, Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan. (Yogyakarta : Wodpress, 2009). 94

upaya pembinaan yang di tunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Menurut Rahman Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya yang berencana dan sistematis yang di lakukan oleh pendidik atau pengasuh anak 0-8 tahun dengan tujuan agar anak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.<sup>60</sup>

Secara institusional, pendidikan Anak Usia Dini juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik koordinasi motorik (halus dan kasar), kecerdasan emosi, kecerdasan jamak (*multiple intelligences*) maupun kecerdasan spiritual.

Secara yuridis, istilah anak usia dini di Indonesia ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Lebih lanjut pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang di tujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmanidan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Selanjutnya pada pasal 28 tentang Pendidikan anak Usia Dini dinyatakan bahwa “(1) Pendidikan anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non-formal, dan/atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat, (5) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal: Pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana di maksud dalam ayat

---

<sup>60</sup> Fari Ulfah, *Manajemen Paud*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bredekamp dan Cople mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini mencakup berbagai program yang melayani anak dari lahir sampai dengan usia delapan tahun yang di rancang untuk meningkatkan perkembangan intelektual, sosial, emosi, bahasa, dan fisik anak.<sup>61</sup>

Anak usia dini mempunyai ciri yang sangat khas, ciri ini tentu saja berbeda dengan fase anak pada usia lainnya. Berikut beberapa karakteristik anak usia dini: (1) Memiliki rasa keingintahuan yang besar; (2) Pribadi yang unik; (3) suka berimajinasi dan berfantasi; (4) masa yang sangat potensial untuk belajar; (5) memiliki sikap egosentris; (6) daya konsentrasi yang rendah; (7) Bagian dari makhluk sosial<sup>62</sup>

Tujuan diselenggarakan pendidikan anak usia dini adalah (1) Tujuan utama : untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan; (2) Tujuan penyerta : untuk menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya.

## 2. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SNPAUD)

SNPAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNPAUD berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu. Selain itu, SNPAUD dijadikan sebagai acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dasar penjaminan mutu PAUD.

---

<sup>61</sup> Suyadi, Maulidya Ulfah, *Konsep Dasar PAUD*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).17-18

<sup>62</sup> Fari Ulfah, *Manajemen Paud*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Berikut Standar Nasional PAUD yang terdapat dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014.<sup>63</sup>

1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
2. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
3. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
4. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
6. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.
7. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.
8. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), Standar Pendidikan Anak Usia Dini, No. 137 tahun 2014.

<sup>64</sup> Salinan Peraturan Pemerintah No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: 2014).2

### 3. Kurikulum 2013 PAUD

Pengaturan tentang kurikulum 2013 PAUD diatur melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014, pasal 3 sebagai berikut: (1) Kurikulum PAUD disebut Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. (2) Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. (3) Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Kerangka Dasar Kurikulum; (b) Struktur Kurikulum; (c) Pedoman Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak; (d) Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; (e) Pedoman Pembelajaran; (f) Pedoman Penilaian; dan (g) Buku-buku Panduan Pendidik.<sup>65</sup> Artinya permendikbud tersebut adalah acuan tentang kurikulum untuk pendidikan anak usia dini. Pada permendikbud tersebut tidak hanya menjadi payung hukum pemberlakuan kurikulum 2013 PAUD, tetapi sudah mengatur tentang struktur kurikulum, dan pedoman-pedoman pengembangan kurikulum 2013 serta buku panduan bagi pendidiknya.

PAUD merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Pendidikan anak usia dini harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik-integratif agar di masa emas perkembangan anak mendapatkan stimulasi yang utuh, untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan potensi tersebut melalui program pendidikan yang terstruktur. Komponen untuk pendidikan yang terstruktur adalah kurikulum.<sup>66</sup>

Kurikulum menjadi panduan dalam penyiapan sumber daya manusia berkualitas di masa datang yang dapat mengisi kebutuhan tenaga-tenaga terdidik yang cakap, terampil sesuai dengan perkembangan pengetahuan, teknologi, dan pembangunan. Kurikulum juga memandu pendidik dan tenaga

---

<sup>65</sup> Kementerian Pendidikan Nasional. "Permendikbud No 146 Tahun 2014". Permendikbud 8(33),37

<sup>66</sup> Depdiknas, B. S. N. "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan". Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 021, 9–27. 2006, Hlm; 3

kependidikan dalam memfasilitasi program pendidikan berkualitas yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal melalui pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan sehingga anak mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung keberhasilan di sekolah dan pendidikan pada tahap selanjutnya.<sup>67</sup>

Pengalaman belajar bermakna dan menyenangkan pada pendidikan anak usia dini sangat memotivasi anak dalam mengikuti kegiatan belajar dan bermain, karena karakteristik anak usia dini yang berbeda dengan karakteristik belajar orang dewasa, maka pembelajaran untuk anak usia dini harus lebih memberikan makna bagi anak dan menyenangkan dan mempersiapkan untuk dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut.

### C. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, peneliti terlebih dahulu menelaah karya ilmiah yang berkaitan dengan apa yang hendak dipaparkan dalam penelitian ini. Karya ilmiah yang ada sebelumnya akan memberikan gambaran umum tentang sasaran yang peneliti sajikan dalam tesis ini, yakni untuk menghindari kesamaan dengan karya ilmiah sebelumnya. Berdasarkan penelusuran peneliti, beberapa karya ilmiah yang bertema hampir sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 3 Nomor 2 tahun 2019 yang ditulis oleh Yusutria dengan judul “Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini melalui Peningkatan Profesionalitas Guru”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya meningkatkan mutu pendidikan PAUD harapan bangsa Kota Padang. Metode penelitian deskriptif kualitatif, adapun teknik analisis data berdasarkan pada reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah kendala lembaga PAUD diantaranya kualifikasi pendidikan, pengalaman,

---

<sup>67</sup> Depdiknas, B. S. N. “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.” Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 021, 9–27.2006, Hlm;4

sarana prasarana yang memadai, serta tetap menjaga lancarnya komunikasi baik dengan pihak yayasan, guru, dan orang tua.<sup>68</sup>

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan, yaitu penelitian sama-sama dilakukan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu terfokus dengan upaya peningkatan mutu sedangkan penelitian ini fokus pada manajemen mutu.

2. Tesis dengan judul “Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi perbandingan pada PAUD Terpadu Negeri Pembina dan PAUD Robbi Roddiyah Kabupaten Rejang Lebong)” yang ditulis oleh Suharti mahasiswi Pascasarjana Universitas Bengkulu tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan manajemen pendidikan anak usia dini pada PAUD Terpadu Negeri Pembina dan PAUD Rabbi Rodliyah Kabupaten Rejang Lebong. Metode pada penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan manajemen pada kedua lembaga tersebut memiliki banyak persamaan dan perbedaan di beberapa aspek wajib untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan, yaitu penelitian sama-sama dilakukan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Adapun perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan deskriptif komparatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif<sup>69</sup>

3. Jurnal Literasi, Volume VIII Nomor 2 tahun 2017 yang ditulis oleh Maya Novita Sari dengan judul “Implementasi Manajemen Mutu Terpadu di PAUD PGTK IT Harapan

---

<sup>68</sup> Yusutria, “Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini melalui Peningkatan Profesionalitas Guru”, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 3 no. 2 (2019): 27-32.

<sup>69</sup> Suharti, “Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka meningkatkan Mutu Pembelajaran (Studi perbandingan pada PAUD Terpadu Negeri Pembina dan PAUD Robbi Roddiyah Kabupaten Rejang Lebong)” (Tesis Universitas Bengkulu 2013)

Mulia”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis serta mengetahui implementasi Manajemen mutu terpadu dalam pendidikan anak usia dini di Play Group Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (PG TKIT) harapan mulia Palembang. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pada penelitian terdahulu fokus pada implementasi MMT di lembaga, sedangkan penelitian ini fokus pada manajemen mutu pada lembaga yang diteliti.<sup>70</sup>

4. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume Nomor 2 tahun 2018 yang ditulis oleh Radhiyatul Fitri dengan Judul “Peningkatan Mutu Sekolah TK Melalui Akreditasi Se-Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Penilain TK di Kecamatan Pucuk Rantau belum begitu baik. Hal ini terlihat dari berbagai hambatan seperti kegiatan Akreditasi yang dilakukan belum dipahami secara penuh oleh seluruh TK yang ada di Kecamatan.<sup>71</sup>
5. Jurnal Buana Gender, Volume I Nomor 2 tahun 2016 yang ditulis oleh Fetty Ernawati dengan judul “Konstruksi Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Raudlatul Athfal di Kartasura”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mutu penyelenggaraan Pendidikan Raudlatul Athfal dan kebutuhan serta kemauan stakeholder. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif . pengambilan data menggunakan angket yang dikembangkan berdasarkan Standar PAUD yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 137 tahun 2014.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan, yaitu penelitian sama-sama dilakukan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Adapun perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan

---

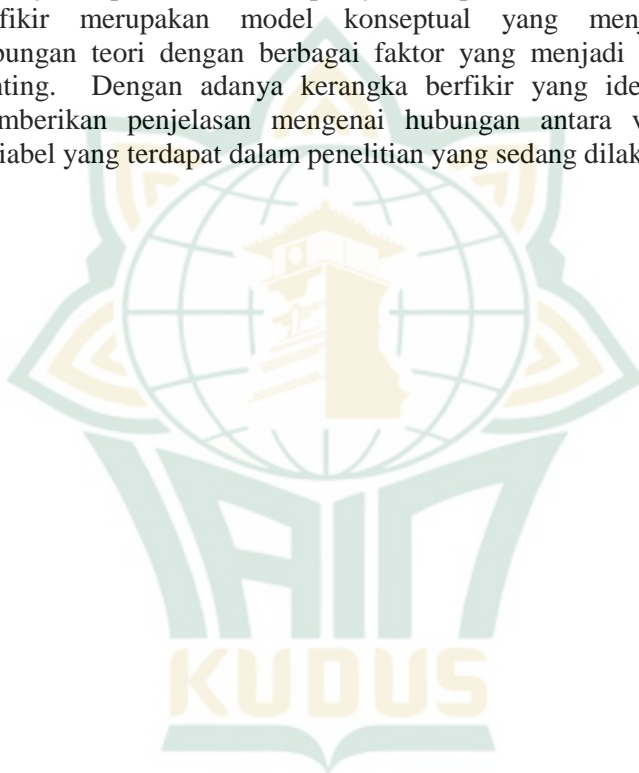
<sup>70</sup> Maya Novita Sari, “Implementasi Manajemen mutu Terpadu di PAUD PGTK IT Harapan Mulia”, *Jurnal Literasi*, Volume VIII no. 2 (2017): 111-117.

<sup>71</sup> Radhiyatul Fitri, “Peningkatan Mutu Sekolah TK Melalui Akreditasi Se-Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi”, Volume No. 2 (2018), 1-15

dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif<sup>72</sup>

#### D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menjadi dasar untuk membuat konstruksi pengetahuan ilmiah, yang berguna menjawab pertanyaan penelitian dan pernyataan penelitian.<sup>73</sup> Kerangka berfikir merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan teori dengan berbagai faktor yang menjadi masalah penting. Dengan adanya kerangka berfikir yang ideal akan memberikan penjelasan mengenai hubungan antara variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian yang sedang dilakukan.<sup>74</sup>



---

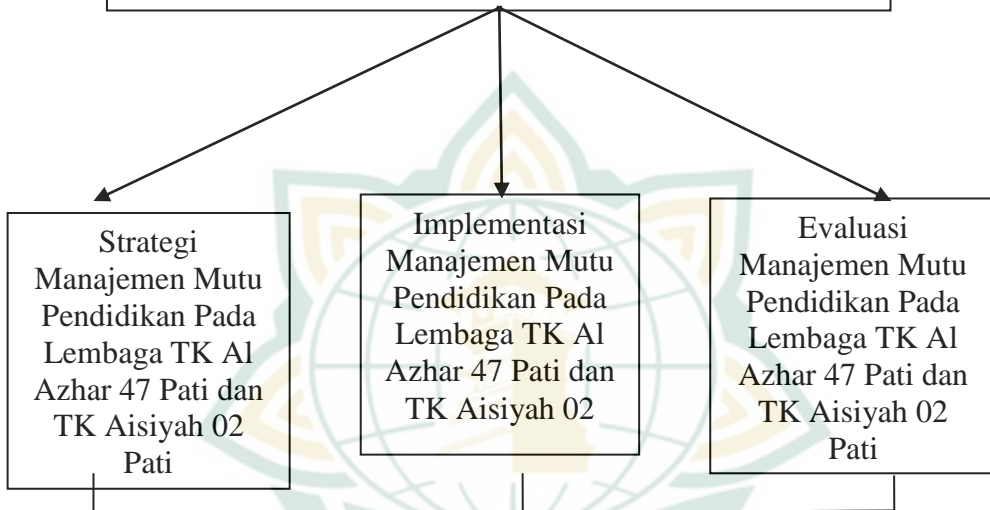
<sup>72</sup> Fetty Ernawati, “Konstruksi Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Raudlatul Athfal di Kartasura”, *Jurnal Buana Gender*, Volume I Nomor 2 (2016), 166-176

<sup>73</sup> Aviv Syaifullah, *Prinsip Dasar Penyusunan dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: PT Grasindo, 2015), 61.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), 91.

MANAJEMEN MUTU

MANAJEMEN MUTU PADA LEMBAGA TK AI AZHAR 47 PATI DAN TK AISIYAH 02 PATI



Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian lapangan (Field Research)
2. Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research) di TK AI Azhar 47 Pati dan TK Aisyah 02 Pati
3. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan Observasi

Langkah strategi Manajemen Mutu pada lembaga TK AI Azhar 47 Pati dan TK Aisyah 02 Pati

Langkah Evaluasi Manajemen Mutu pada lembaga TK AI Azhar 47 Pati dan TK Aisyah 02 Pati